

## RUMUS PEMILUKADA DI KOTA PALEMBANG



*Alamsyah*

Dosen Ilmu Administrasi Negara  
FISIP Universitas Sriwijaya

Sebentar lagi, beberapa daerah di Sumatera Selatan akan menggelar pilkada. Di antara daerah ini, pilkada Kota Palembang yang paling kompetitif dan strategis. Kualitas kompetitif itu disebabkan dua hal, *pertama*, komposisi penduduknya yang multi-etnis sehingga isu putra daerah yang seringkali muncul di beberapa pilkada di Sumatera Selatan tidak bisa dihembuskan di kota ini. Ringkasnya, Palembang itu kota tak bertuan sehingga siapapun yang punya modal politik punya peluang yang sama untuk memenangkan kompetisi lima tahunan ini.

*Kedua*, kota ini dihuni penduduk yang berpendidikan, melek informasi, hidup dari sektor perdagangan barang dan jasa, dan mengedepankan jejaring sosial berbasis komunitas ketimbang kekerabatan. Kondisi ini memproduksi para pemilih yang cerdas, rasional, atau *calak*.

Pilkada Kota Palembang itu strategis. Dari sudut pandang partai politik, Palembang itu seksi karena jumlah penduduk dan APBD-nya yang besar. Memenangkan pilkada Kota Palembang sama artinya dengan penambahan modal politik dalam rangka menghadapi Pilgub Sumsel 2013 dan Pileg 2014. Karena sifatnya yang seperti ini, tak heran jika seluruh parpol yang memiliki peluang untuk mengusung calon walikota Palembang sudah mulai ancap-ancang mempersiapkan kandidatnya.

Tulisan ini tidak bermaksud mengkaji pilkada Kota Palembang secara komprehensif, tetapi hanya ditujukan untuk melihat proses politik ini dari “sisi lain”. Kehadirannya diharapkan dapat menstimulasi lahirnya kandidat dan para pemilih yang lebih cerdas dalam mensikapi proses pilkada yang “menggangu” rutinitas kehidupan pribadi mereka.

\*\*\*\*\*

Pilkada adalah kompetisi politik. Tidak berbeda dengan kompetisi lainnya di negeri ini, pilkada sebagai ajang kompetisi memiliki komponen pemain (kontestan), juri/wasit, aturan, penonton, pengamat, pendanaan, mekanisme resolusi konflik, dan publikasi. Di setiap kompetisi, termasuk pilkada, selalu ada yang kalah dan yang menang. Pertanyaannya, bagaimana memenangkan setiap *event* pilkada?

Setiap aktivis parpol punya argumentasi yang beragam dalam menjawab pertanyaan ini. Argumentasi itu didasarkan atas pengalaman mereka terlibat dalam praksis pilkada yang digulirkan sejak 2005 tatkala pilkada pertama kali dilaksanakan di Sumatera Selatan.

Berbeda dengan jawaban para aktivis parpol yang mengacu ke pengalaman mereka sebagai pemain politik, penulis lebih memilih sudut pandang sebagai pengamat politik untuk menjawab pertanyaan di atas. Dalam pandangan pengamat politik, rumus kemenangan pilkada terangkum dalam istilah **Empat As**, yakni *popularitas*, *elektabilitas*, *isi tas*, dan *cerdas*.

**Popularitas** adalah soal seberapa jauh para kandidat dikenal, diketahui, dan tersimpan dalam memori personal para pemilih. Sejak 2005, para kandidat selalu mengandalkan strategi kontak langsung dengan para pemilih, menggelar *event* sosial-kemasyarakatan, iklan di media

massa, dan *outdoor advertising* (baliho, poster, spanduk, dan lain-lain) untuk meningkatkan *rating* popularitas politik mereka.

**Elektabilitas** adalah istilah yang menjelaskan seberapa jauh para kandidat betul-betul akan dipilih oleh para pemilih. Elektabilitas seorang kandidat dianggap tinggi jika proporsi para pemilih yang akan memilihnya di hari H pilkada lebih banyak dari kandidat lainnya. Elektabilitas akan sangat meyakinkan jika angka proporsinya tidak berbeda jauh tatkala seorang pemilih dihadapkan dengan beragam pilihan politik (misalnya, dua pilihan, tiga pilihan, empat pilihan, dan seterusnya). Konsistensi (loyalitas, *istiqomah*) pilihan para pemilih terhadap kandidat merupakan ukuran utama elektabilitas yang sering digunakan banyak lembaga survei di Tanah Air.

Kaitan antara popularitas dan elektabilitas cukup sederhana, yakni: (a) kandidat yang dikenal dan diketahui para pemilih belum tentu akan dipilih oleh para pemilih (tingginya popularitas belum tentu menyebabkan tingginya elektabilitas). Meskipun begitu, kandidat yang populer akan lebih mudah meningkatkan kadar elektabilitas mereka; (b) kandidat yang tidak dikenal dan tidak diketahui para pemilih hampir bisa dipastikan tidak akan dipilih oleh para pemilih (rendahnya popularitas menyebabkan rendahnya elektabilitas).

Mayoritas kandidat banyak terjebak dengan popularitas. Ketika baliho terpasang dimana-mana, seluruh wilayah daerah sudah didatangi, dan seluruh komunitas para pemilih sudah disapa, maka kandidat merasa dirinya sudah di atas angin. Padahal, di mata para pemilih, urusan “mengenal” dan “memilih” kandidat dalam pilkada berbeda seribu derajat.

Salah satu faktor yang menyebabkan popularitas tidak seiring sejalan dengan elektabilitas adalah politik uang. Para praktisi politik praktis umumnya meyakini pepatah Melayu yang berbunyi: *kemarau setahun sirna karena hujan sehari*. Pepatah ini menjelaskan bagaimana perilaku pemilih pilkada sangat cair dan elastis tatkala berhadapan dengan politik uang yang dimainkan para kandidat.

Politik uang berkaitan dengan variabel ketiga, yakni: **isi tas**. Selain dana segar, tas kandidat bisa berisi dokumen visi misi, dukungan politik dari parpol, strategi pemenangan, dokumen hasil survey, data primer dan sekunder yang terkait dengan daerah, dan dokumen lainnya yang dianggap penting bagi kandidat. Meski maknanya beragam, tetapi lebih banyak orang memaknai isi tas sebagai ketersediaan dana segar dalam jumlah besar.

Dalam pilkada, uang adalah keniscayaan. Hampir setiap *event* yang digelar kandidat membutuhkan pembiayaan. Memproduksi dan mendistribusikan atribut sosialisasi kandidat, mengunjungi para pemilih di tempat tinggal mereka, produksi iklan di media massa, pergerakan tim pemenangan, dan meminjam parpol sebagai kendaraan pencalonan, semuanya membutuhkan dana segar.

Tetapi, uang dalam jumlah besar tidak selalu memastikan kemenangan seorang kandidat dalam pilkada. Variabel terakhir, **cerdas**, memainkan peran penting sehingga popularitas, elektabilitas, dan isi tas saling menopang dan bersinergi untuk memenangkan seorang kandidat dalam pilkada. Cerdas itu tidak hanya akal pikirannya, tetapi juga hatinya.

\*\*\*\*\*

Hampir semua kandidat Pilwako Palembang, Romi Hertan (*incumbent*), Sarimuda, Mularis Djahri, dan Sarjan Thahir, sudah memenuhi empat rumus di atas. Tetapi, karena kursi walikota hanya satu, maka tidak mungkin semuanya menjadi walikota. Lantas, variabel apalagi yang harus diperhitungkan para kandidat? Jawabnya sederhana: *pertama*, rumus di atas tidak memperhitungkan arena politik praktis sebagai panggung sandiwara. Artinya, kandidat yang menang adalah mereka yang kualitas aktingnya lebih baik ketimbang aktor lainnya. Dalam konteks ini, politik merupakan seni peran. Karena politik adalah seni, maka intuisi dan naluri harus mengisi kelemahan rasionalitas akal sehat yang sering terjebak ke

dalam beragam sesat pikir logika. *Kedua*, faktor nasib yang selalu tidak memuaskan jika dijelaskan secara ilmiah. Semoga tulisan ini mencerahkan!